



RENJA

TAHUN 2024

BPBD
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BLITAR



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BLITAR**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Keterkaitan antara Renja PD dengan RKPD	2
1.1.2 Keterkaitan antara Renja PD dengan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah	2
1.1.3 Keterkaitan antara Renja PD dengan Renja Kementerian/Lembaga dan Renja Provinsi	3
1.1.4 Renja dan Tindak lanjutnya dalam APBD	3
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20
2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD)	20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	29
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR	30
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	30
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar	32
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	40
BAB V PENUTUP	47

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Penanganan Bencana Daerah	8
Tabel 2.1.1	Hasil Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022	12
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Blitar	21
Tabel 2.4	Usulan Program Dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Blitar	29
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah	32
Tabel 3.2	Data Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Penanggulangan	34
Tabel 4.1	Rencana Tindak Lanjut LKJIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022	41
Tabel 4.2	Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Jenjang perencanaan daerah terdiri dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Ketentuan selanjutnya diatur dalam Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 273 (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD. RKPD dimaksud memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 13 Ayat (2) Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Dalam pasal 16 Ayat (2) menyatakan Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan. Dengan demikian, pernyataan tahapan penyusunan Renja PD yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan utama pada paragraf kedua supaya disempurnakan.

Berdasarkan Pasal 126 Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Setelah disusun berdasarkan tahapan dan tatacara, maka rancangan Renja Perangkat Daerah disempurnakan menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 39 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2021 nomor 39).

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2024 disusun dengan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju;

2. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2023 yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan / atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
3. Memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi baik untuk tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025;
4. Penyusunan Renja PD bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD 2024, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

1.1.1 Keterkaitan antara Renja PD dengan RKPD

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan, penyusunan renja salah satunya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu pasal 78 ayat 1 huruf (d) Permendagri nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Ini artinya antara Renja dan RKPD merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Renja berpedoman pada RKPD, sementara penyusunan Ranwal RKPD mencakup penelaahan terhadap Ranwal Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 berpedoman kepada RKPD Kota Blitar tahun 2024.

1.1.2 Keterkaitan antara Renja PD dengan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah

Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Renja perangkat Daerah juga berpedoman pada RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Pelaksanaan RPJMD setiap tahun dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dengan kata lain, RPJMD digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam Permendagri nomor 87 Tahun 2017, disebutkan bahwa sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran Renja Perangkat Daerah, merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah. Ini artinya harus terdapat kesesuaian antara dokumen renstra dengan dokumen renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar tahun 2024 juga berpedoman pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026.

1.1.3 Keterkaitan antara Renja PD dengan Renja Kementerian / Lembaga dan Renja Provinsi

Renja Kementerian/lembaga (Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur) tidak terkait secara langsung dalam proses penyusunan Renja PD, seperti halnya Renstra maupun RKPD. Namun Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur perlu ditelaah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana program provinsi yang dapat berpengaruh langsung terhadap Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar tahun 2024.

1.1.4 Renja dan Tindak lanjutnya dalam APBD

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024. Sedangkan RKA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan sebagai dokumen APBD Kota Blitar. Oleh karena itu Renja merupakan salah satu dokumen penting untuk kemudian ditindaklanjuti dalam APBD Kota Blitar Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6841);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
21. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Nomor 41 Tahun 2023 Seri E);
30. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7); dan
32. Peraturan Walikota Blitar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
33. Peraturan Walikota Blitar Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 71);
34. Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Disusunnya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 – 2026 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2024

Adapun Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS Tahun 2024 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2024

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 sebagai berikut :

- | | |
|--------|---|
| BAB I | Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan. |
| BAB II | Hasil Evaluasi RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun lalu, berisikan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun lalu dan Pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah s/d Tahun 2023, |

	Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar, Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III	Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menguraikan mengenai Telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Program dan Kegiatan.
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BAB V	Penutup, menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Guna memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun lalu (2022) dan prakiraan capaian tahun berjalan (2023) dengan mengacu pada APBD tahun 2023. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun – tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Adapun program yang dilaksanakan pada tahun 2022 (n-2) dan tahun 2023 (n - 1) adalah sebagai berikut :

1. Program Penanggulangan Bencana
 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
- ;

Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2023

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub kegiatan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
								Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
05				Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase SDM penanganan bencana yang terlatih	95 %	-	91%	66 %	73 %	92 %	92 %	96,84 %
					Jumlah kelurahan Tangguh bencana kategori Madya	3 kelurahan	-	1 kelurahan	1 kelurahan	100 %	2 kelurahan	2 kelurahan	66,67 %
					Persentase kelengkapan sarana prasarana pendukung penanganan bencana	80 %	-	40 %	40 %	100 %	50 %	50 %	62,50 %
					Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
05	03	2.01		Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten / kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %		-	-	-	100 %	100 %	100 %
05	03	2.01	02	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten / kota (per jenis bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten / kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di Kawasan tempat tinggalnya	3800 orang	-	-	-	-	950 orang	950 orang	25 %

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100 %
05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara dan aparaturnya yang mengikuti pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	380 orang	-	-	-	-	90 orang	90 orang	23,68 %
05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	48 dokumen	-	-	-	-	12 dokumen	12 dokumen	25 %
05	03	2.02	06	Penguatan kapasitas Kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	84 kawasan	-	-	-	-	21 kawasan	21 kawasan	25 %
05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100 %
05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	200 orang	-	-	-	-	50 orang	50 orang	25 %
05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase dokumen penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang Tersusun	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100 %
05	03	2.04	03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	4 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	25 %

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik (80,60)	-	-	-	-	Baik (80,50)	Baik (80,50)	99,88 %
05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	-	-	-	-	100%	100%	100 %
05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	48 dokumen	-	-	-	-	12 dokumen	12 dokumen	25 %
05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80 laporan	-	-	-	-	20 laporan	20 laporan	25 %
05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	-	-	-	-	100%	100%	100 %
05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100 ASN	-	-	-	-	25 ASN	25 ASN	25%
05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 laporan	-	-	-	-	5 dokumen	5 dokumen	25 %
05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	-	-	-	-	100%	100%	100 %
05	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	12 paket	-	-	-	-	3 paket	3 paket	100 %
05	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	100 orang	-	-	-	-	25 orang	25 orang	100 %
05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	-	-	-	-	100%	100%	100 %
05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	-	-	-	-	1 paket	1 paket	100 %
05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	-	-	-	-	3 paket	3 paket	25 %
05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 paket	-	-	-	-	3 paket	3 paket	25 %

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	32 Paket	-	-	-	-	8 paket	8 paket	25 %
05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4 paket	-	-	-	-	1 paket	1 paket	25 %
05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	96 dokumen	-	-	-	-	24 dokumen	24 dokumen	25 %
05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 laporan	-	-	-	-	50 rakor	50 rakor	25 %
05	01	2.07		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %					100 %	100 %	100 %
05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	8 unit	-	-	-	-	4 unit	4 unit	50 %
05	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	32 unit	-	-	-	-	22 unit	22 unit	68,75 %
05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	144 laporan	-	-	-	-	36 laporan	36 laporan	25 %
05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	52 laporan	-	-	-	-	13 laporan	13 laporan	25 %
05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	60 unit	-	-	-	-	15 unit	15 unit	25 %
05	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	80 unit	-	-	-	-	20 unit	20 unit	25 %
05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	148 unit	-	-	-	-	37 unit	37 unit	25 %

Tabel 2.1.1 Hasil Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022

Kode rekening				Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target kinerja	Target anggaran	Realisasi kinerja	Realisasi anggaran	Capaian kinerja	Capaian anggaran
05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase SDM penanganan bencana yang terlatih	91%	1.192.975.695	66%	1.039.082.616,08	66%	87,10%
					Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana Kategori Madya	1 kel		1	0	100%	0
					Persentase kelengkapan sarana prasarana pendukung penanganan bencana	40%		40%	0	100%	0
					Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%		100%	0	100%	0
05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase kompetensi SDM penanganan bencana yang terlatih	86%	338.658.130	66%	326.912.366,08	76,74%	96,53%
					Persentase kelurahan yang diusulkan kelurahan tangguh bencana kategori Madya	4.7%		4.7%	0	100%	0
					Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%		100%	0	100%	0

Kode rekening				Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target kinerja	Target anggaran	Realisasi kinerja	Realisasi anggaran	Capaian kinerja	Capaian anggaran
					Persentase pemanfaatan sarana prasarana pendukung penanganan bencana	40%		40%	0	100%	0
05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pembekalan pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam	370 Orang	135.042.560	370 Orang	130.261.400	100%	96,46%
					Jumlah pendampingan kelurahan tangguh bencana	21 Kel		4 Kel	0	19,05%	0
					Jumlah penyebarluasan informasi kebencanaan	4 Jenis		4 Jenis	0	100%	0
05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1. Jumlah peserta rapat koordinasi PUSDALOPS PB dan penanganan kejadian	250 Orang	203.615.570	250 Orang	196.650.966,08	100%	96,58%
					2. Jumlah sarana dan prasarana kebencanaan yang tersedia	3 Jenis		3 Jenis		100%	
05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	627.343.600	100%	496.828.300	100%	79,20%
05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Logistik untuk Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	12 Jenis	627.343.600	12 Jenis	496.828.300	100%	79,20%
05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase dokumen penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang tersusun	25%	226.973.965	25%	215.341.950	100%	94,87%

Kode rekening				Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target kinerja	Target anggaran	Realisasi kinerja	Realisasi anggaran	Capaian kinerja	Capaian anggaran
05	03	2.04	03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peserta rakor antar Lembaga dalam penanganan bencana	170 Orang	226.973.965	170 Orang	215.341.950	100%	94,87%
					Jumlah dokumen penanggulangan bencana	2 dokumen		2 dokumen		100%	
05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik (79)	2.953.146.039	Baik (84,08)	2.740.380.519,20	95%	92,80%
05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	52.001.300	100%	50.190.600	100%	96,52%
05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan yang tersusun	11 dokumen	8.510.200	11 dokumen	8.510.200	100%	100%
05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan yang tersusun	9 dokumen	33.510.200	9 dokumen	33.229.900	100%	99,16%
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	9.980.900	1 dokumen	8.450.500	100%	84,67%
05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	999.287.168	100%	958.631.474	100%	95,93%
05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangan	13 ASN	991.518.168	13 ASN	950.862.474	100%	95,90%

Kode rekening				Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target kinerja	Target anggaran	Realisasi kinerja	Realisasi anggaran	Capaian kinerja	Capaian anggaran
05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun (Bulanan/Triwulan/Semesteran) yang disusun	5 dokumen	7.769.000	5 dokumen	7.769.000	100%	100%
05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standart	100%	85.994.200	100%	85.155.900	100%	99,02%
05	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	4 event	85.994.200	4 event	85.155.900	100%	99,02%
					Jumlah Publikasi Program/kegiatan Perangkat Daerah	3 Jenis	0	3 Jenis	0	100	0
05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standart	100%	1.275.735.652	93,33%	1.218.314.171	93,33%	95,50%
05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	6 Komponen	21.859.400	6 Komponen	21.843.000	100%	99,92%
05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	37 Jenis	944.334.602	37 Unit	901.903.700	100%	95,50%
					Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	10 jenis	0	10 jenis	0	100%	0
05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	30 Jenis	61.196.600	30 Jenis	60.697.600	100%	99,18%
05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	1100 dos	47.836.650	1100 dos	47.260.700	100%	98,80%

Kode rekening				Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target kinerja	Target anggaran	Realisasi kinerja	Realisasi anggaran	Capaian kinerja	Capaian anggaran
					Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	43 Jenis	0	43 Jenis	0	100%	0
05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	8 Cetakan	39.051.400	8 Cetakan	39.051.400	100%	100%
					Jumlah lembar penggandaan	28473 Lembar	0	28473 Lembar	0	100%	0
05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	3 Bahan Bacaan	7.440.000	1 Bahan Bacaan	300.000	33,33%	4,03%
05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	50 Rakor	154.017.000	50 Rakor	147.257.771	100%	95,61%
05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	191.144.942	89%	102.002.419,20	89%	53,37%
05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	3 Rekening	43.392.542	3 Rekening	14.917.143	100%	34,38%
05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah iuran kebersihan yang terbayarkan, jumlah tenaga kebersihan yang terbayarkan	12 Kali	147.752.400	8 kali	87.085.276,20	66,67%	58,94%
					Jumlah tenaga penunjang perkantoran yang tersedia	5 Orang	0	5 Orang	0	100%	0
05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	348.982.777	0	326.085.955	87%	93,44%
05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	14 Unit	82.769.377	8 unit	61.856.655	57,14%	74,73%

Kode rekening				Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target kinerja	Target anggaran	Realisasi kinerja	Realisasi anggaran	Capaian kinerja	Capaian anggaran
					Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	5 Unit	0	5 Unit	0	100%	0
05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	10 Jenis	10.474.100	10 Jenis	10.340.000	100%	98,72%
05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	1 Unit	241.140.000	1 unit	239.290.000	100%	99,23%
05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	10 Jenis	14.599.300	8 jenis	14.599.300	80%	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong :

- a. Adanya koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama sektoral dan pemerintah daerah;
- b. Tersedianya mekanisme pendanaan yang lebih fleksibel bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara atasan dan bawahan dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.
- d. Adanya dukungan OPD terhadap upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan.
- e. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga mampu memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.

2. Faktor Penghambat :

- a. Belum memadainya / Keterbatasan jumlah sumberdaya manusia
- b. Belum tersedianya data – data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam proses penciptaan daerah yang kondusif komprehensif dan berkelanjutan.
- c. Belum memadainya kemampuan untuk menyusun suatu kerangka pembangunan strategis yang benar – benar mencerminkan kondisi, potensi dan kebutuhan masyarakat.
- d. Belum optimalnya kegiatan penelitian dan pengkajian sebagai dasar pengambilan keputusan dalam proses penciptaan yang kondusif.
- e. Masih terdapatnya kebijakan pembangunan pusat yang sering kali berubah karena perkembangan politik.

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) tahun 2022 dapat dikatakan berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Hal tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2022-2025

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	SPM/Standart Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kapasitas Daerah		IKU	0,53	0,55	0,57	0,59	0,40	0,55	0,57	0,59	Capaian ini bisa dikatakan belum memenuhi target. Adapun permasalahan yang muncul adalah : -Belum adanya kebijakan/regulasi/peraturan daerah yang mengatur tentang penanggulangan bencana -Minimya bukti dukung dari OPD dalam pemenuhan dokumen pendukung Indeks kapasitas Daerah. sehingga diperlukan Kerjasama sekaligus penekanan kepada OPD tentang pentingnya pemenuhan dokumen untuk pengisian IKD
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	SPM	IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	SPM	IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	SPM	IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis dimaksud antara lain :

1. Sumberdaya manusia yang terbatas, yang belum sepenuhnya diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sehingga belum optimal;
2. Pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah kepada peningkatan kinerja;
3. Belum tersedianya data – data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan;
4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program – program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan;
5. Pengaruh Globalisasi yang membuat semakin pesatnya perkembangan teknologi dan masuknya kultur asing yang bebas;
6. Perubahan peraturan perundang – undangan sehingga belum sepenuhnya dapat terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah;
7. Belum meratanya kualitas SDM Perencana;
8. Masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan untuk mendukung peningkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUAPPAS.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar berdasarkan RKPD Kota Blitar sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja PD se- Kota Blitar yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di Wilayah Kota Blitar.

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024 KOTA BLITAR

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	Program Penanggulangan bencana	Kota Blitar	Persentase SDM penanganan bencana yang terlatih	93 %	1.047.867.924	Program Penanggulangan bencana	Kota Blitar	Persentase SDM penanganan bencana yang terlatih	93 %	1.047.867.224	- Adanya koreksi identifikasi ulang kebutuhan perangkat daerah - Penyesuaian pagu anggaran
			Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana Kategori Madya	2 kelurahan				Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana Kategori Madya	2 kelurahan		
			Persentase kelengkapan sarana prasarana pendukung penanganan bencana	60 %				Persentase kelengkapan sarana prasarana pendukung penanganan bencana	60 %		
			Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100 %				Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100 %		
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	182.623.200	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	182.623.200	
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)		Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di Kawasan tempat tinggalnya	950 orang	182.623.200	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di Kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang memperoleh Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Sesuai Jenis Ancaman Bencana yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya selama 1 (satu) tahun	950 orang	182.623.200	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	429.440.324	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	425.939.924	Rincian Menyesuaikan kebutuhan
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	90 Orang	60.859.000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Warga Negara termasuk kelompok rentan di Kawasan rawan bencana kabupaten / kota yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	8 kawasan	60.859.800	
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 dokumen	265.491.884	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di Kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	261.991.884	
	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan		Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	21 kawasan	60.870.100	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan		Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	21 kawasan	60.869.900	
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota		Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	250 orang	42.219.340	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota		Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	6 orang	42.219.340	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	203.172.800	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	206.672.800	Rincian Menyesuaikan kebutuhan
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	50 orang	203.172.800	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	50 orang	206.672.800	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulanga Bencana		Persentase dokumen penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang Tersusun	100 %	232.631.600	Penataan Sistem Dasar Penanggulanga Bencana		Persentase dokumen penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang Tersusun	100 %	232.631.300	
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 dokumen	232.631.600	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 dokumen	232.631.300	
2	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,50 indeks	3.434.160.482	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,50 indeks	3.434.161.082	- Adanya koreksi identifikasi ulang kebutuhan perangkat daerah -Penyesuaian pagu anggaran

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	24.610.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	24.610.500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	12 dokumen	6.473.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	12 dokumen	6.473.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 laporan	18.137.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 laporan	18.137.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	2.102.114.719	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	2.102.119.819	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2.097.241.319	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang / bulan	2.097.241.319	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5 laporan	4.873.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5 laporan	4.878.500	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	132.767.800	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	138.933.800	Rincian Menyesuaikan kebutuhan
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 paket	24.724.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	14.902.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan		Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	25 orang	108.043.800	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan		Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	25 orang	124.031.800	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	328.506.400	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	349.592.400	Rincian Menyesuaikan kebutuhan

NO	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	8.181.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	8.181.500	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 paket	27.092.400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	27.092.400	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	3 paket	9.857.200	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	9.857.200	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	8 paket	27.209.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 paket	27.209.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	40.788.300	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	40.788.300	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	24 dokumen	5.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	24 dokumen	5.400.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	209.978.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	231.064.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	581.124.063	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	559.117.563	Rincian Menyesuaikan kebutuhan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 laporan	41.292.063	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 laporan	41.292.063	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	13 laporan	539.832.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	13 laporan	517.825.500	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	265.037.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	259.787.000	Rincian Menyesuaikan kebutuhan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15 unit	184.857.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	11 unit	180.957.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang dipelihara	20 unit	6.918.000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang dipelihara	18 unit	6.918.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	37 unit	18.862.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	37 unit	17.512.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	1 unit	54.400.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	1 unit	54.400.000	

2.5 Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada tahun 2024 tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan Kota Blitar

TABEL 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU
KEPENTINGAN TAHUN 2024
KOTA BLITAR

NO.	Usulan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2		3	4	5	6
	NIHIL					

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BLITAR

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024, disebutkan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, dengan sasaran :
 - Meningkatkan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
 - Meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian;
 - Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
 - Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
 - Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
 - Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi
 - Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
 - Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) ; dan
 - Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan dengan sasaran :
 - Pembangunan Wilayah Sumatera;
 - Pembangunan Wilayah Jawa-Bali;
 - Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;
 - Pembangunan Wilayah Kalimantan;
 - Pembangunan Wilayah Sulawesi;
 - Pembangunan Wilayah Maluku; dan
 - Pembangunan Wilayah Papua.
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan Berdaya saing, dengan sasaran :
 - Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan;
 - Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk;
 - Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan;
 - Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan;
 - Meningkatnya produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan sasaran:
 - Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
 - Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
 - Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
 - Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
 - Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa; dan
 - Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dengan sasaran :
 - Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
 - Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
 - Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;
 - Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan sasaran :
 - Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim; dan
 - Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline.
7. Memperkuat Stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik dengan sasaran :
 - Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi, dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara secara Optimal;
 - Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;
 - Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;
 - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik; dan
 - Terjaganya Stabilitas Keamanan Nasional.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2024 diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui agenda pembangunan yang perlu dilakukan Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta
- c. pembangunan rendah karbon.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - 2) penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - 3) pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
 - 4) penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang Sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penanggulangan bencana; dan
 - 2) peningkatan ketahanan iklim.
- c. pembangunan rendah karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pembangunan energi berkelanjutan;
 - 2) pemulihan lahan berkelanjutan; dan
 - 3) pengembangan industri hijau.

Berdasarkan arah kebijakan Nasional Tahun 2024, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana sedangkan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien ;
- b) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh ;
- c) Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan;
- d) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi OPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu. Sehingga ditentukan indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2024

No	sasaran	Indikator Kinerja	2022		2023		2024
			Target	Realisasi	Target	Perkiraan Realisasi	Target
1	Tujuan : Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indikator Tujuan : Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,56	0,40	0,58	0,58	0,60
	Sasaran : Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	Indikator sasaran ; Indeks kapasitas daerah	0,53	0,40	0,55	0,55	0,57

2	Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A(80)	OPD baru dibentuk sehingga tidak masuk penilaian	A(80)	A(80)	A(80)
	Sasaran : Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Indikator Sasaran : Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A(80)	OPD baru dibentuk sehingga tidak masuk penilaian	A(80)	A(80)	A(80)

3.3 Data Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1					2	3	4
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Mendukung Pencapaian Tupoksi
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1	05	01	2.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	
1	05	01	2.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1					2	3	4
1	05	01.01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	
1	05	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1					2	3	4
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan BMD Penunjang Urusan sesuai Kebutuhan	
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1					2	3	4
1	05	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase SDM Penanganan bencana yang terlatih	Mendukung pencapaian SPM dan IKK
						Persentase kelengkapan sarana prasarana pendukung penanganan bencana	
						Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	
						Jumlah kelurahan tangguh bencana kategori madya	
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1					2	3	4
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di Kawasan tempat tinggalnya	
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase pelayanan penecegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	
1	05	03	2.02	06	Penguatan kapasitas Kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	
1	05	03	2.02	08	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan managerialnya	
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1					2	3	4
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase dokumen penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang Tersusun	
1	05	03	2.04	03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Adapun prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar adalah pada kegiatan yang mendukung capaian SPM sebagai berikut :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Tindak lanjut LKJIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar tahun 2022 adalah :

1. Meningkatkan fungsi koordinatif BPBD Kota Blitar dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk merangkul semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana, baik di internal pemerintah maupun lembaga-lembaga terkait kebencanaan, swasta dan masyarakat;
2. Menyusun kebijakan/regulasi/peraturan daerah yang mengatur tentang penanggulangan bencana.

Sebagaimana tercantum pada tabel 4.1. Sedangkan rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum pada tabel 4.2.

Terdapat 2 program, 10 kegiatan, dan 26 Sub Kegiatan pada Badan Penanggulangan bencana Daerah Kota Blitar, dengan pagu indikatif Tahun 2024 sebesar Rp. 4.482.028.306,- dan Prakiraan maju rencana tahun 2025 dengan pagu indikatif Rp. 4.706.647.420,-

Tabel 4.1
RENCANA TINDAK LANJUT LKJIP BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2022
PADA RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2024

No.	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
1.	Meningkatkan fungsi koordinatif BPBD Kota Blitar dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk merangkul semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana, baik di internal pemerintah maupun Lembaga-lembaga terkait kebencanaan, swasta dan masyarakat	Meningkatkan kerjasama antar Lembaga, instansi Pemerintah, Swasta dan organisasi relawan secara berkelanjutan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota
2.	Menyusun kebijakan/regulasi/peraturan daerah yang mengatur tentang penanggulangan bencana	Segara Menyusun NA Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota

Tabel 4.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				4.482.028.306				4.706.647.420
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		80,50 indeks	3.434.161.082			80,55 indeks	3.606.386.835
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100 %	24.610.500			100 %	25.841.025
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	6.473.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	6.797.175
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Laporan	18.137.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Laporan	19.043.850
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		100 %	2.102.119.819			100%	2.207.225.809

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang/bulan	2.097.241.319	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25 Orang/bulan	2.202.103.384
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Laporan	4.878.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Laporan	5.122.425
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100 %	138.933.800			100 %	146.398.190
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	14.902.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	16.164.800
1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang	124.031.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25 Orang	130.233.390
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		100 %	349.592.400			100 %	367.072.020
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	8.181.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	8.590.575
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	27.092.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	28.447.020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	9.857.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	10.350.060
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	27.209.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	28.569.450
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	40.788.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	42.827.715
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Dokumen	5.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Dokumen	5.670.000
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Laporan	231.064.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Laporan	242.617.200
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		100 %	559.117.563			36 Laporan	587.073.441
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Laporan	41.292.063	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 Laporan	43.356.666
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Laporan	517.825.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13 Laporan	543.716.775
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar		100 %	259.787.000			100 %	272.776.350
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 Unit	180.957.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Unit	190.004.850

Kode	Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 Unit	6.918.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		18 Unit	7.263.900
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37 Unit	17.512.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		37 Unit	18.387.600
1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	54.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	57.120.000
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana Kategori Madya		2 kelurahan	1.047.867.224			3 kelurahan	1.100.260.585
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana		100 %				100 %	
		Persentase kelengkapan sarana dan prasarana pendukung penanganan bencana		60 %				70 %	
		Persentase SDM penanganan bencana yang terlatih		93 %				94 %	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		100 %	182.623.200			950 Orang	191.754.360
1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di Kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang memperoleh Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Sesuai Jenis Ancaman Bencana yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	950 Orang	182.623.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		950 Orang	191.754.360

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		100 %	425.939.924				447.236.920
1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara termasuk kelompok rentan di Kawasan rawan bencana kabupaten / kota yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Kawasan	60.858.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 kawasan	63.901.740
1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di Kawasan tempat tinggalnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 laporan	261.991.884	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 laporan	275.091.478
1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21 Kawasan	60.869.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		21 Kawasan	63.913.395
1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Orang	42.219.340	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Orang	44.330.307
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100 %	206.672.800			100 %	217.006.440
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	206.672.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Orang	217.006.440
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase dokumen penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang Tersusun		100 %	232.631.300			100 %	244.262.865
1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	232.631.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	244.262.865

BAB V

PENUTUP

Dari uraian – uraian seperti tersebut diatas terdapat catatan penting yang perlu mendapat perhatian yaitu bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Badan komponen daerah yang mengemban tugas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah (Walikota) dalam menentukan dan melaksanakan kebijaksanaan di Bidang penanggulangan bencana. Mengingat betapa strategis tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka sangat mengharapkan dukungan sesama pihak dari instansi terkait untuk saling mengembangkan jaringan komunikasi, koordinasi dan informasi yang lebih intensif.

Kaidah-kaidah yang dipedomani adalah bahwa dalam pelaksanaan tugas harus berpedoman pada Renja Tahun 2024 sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya terutama dalam kaitannya dengan pencapaian target dan indikator perangkat daerah yang telah ditetapkan; serta menjaga keselarasan dan konsistensi antara RKPD, Renja, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) antara lain program/kegiatan, indikator, dan target.

Rencana Tindak Lanjut dengan ditetapkannya Renja Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Blitar Tahun 2024 untuk kemudian dituangkan ke dalam DPA.

Blitar, - - 2023

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Blitar

